



Minimalisir KKN, Pemkot Bentuk ULP

YOGYAKARTA (SI) – Pemerintah Kota Yogyakarta berencana membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk mendukung proses pelelangan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di lingkungannya.

Pembentukan ULP ini ditetapkan Peraturan Wali Kota (Perwal) No 81/2009 tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi ULP serta Perwal No 82/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui ULP. "Pembentukan ULP ini bermaksud agar pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih terpadu. Serta mampu bekerja secara profesional dalam menerapkan prinsip-prinsip pengadaan jasa berdasarkan atas kepastian hukum,

manfaat, kehati-hatian, beritikad baik dan meminimalisasi KKN," kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti kemarin.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Yogyakarta Tri Widayatno mengatakan, sekitar 200 karyawan pemkot telah mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peja-

bat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang dimiliki pemkot diharapkan semakin banyak. Saat ini Pemkot Yogyakarta baru memiliki 125 PPTK bersertifikat. "ULP nantinya akan berisi PPTK bersertifikat terbaik dan lolos ujian lanjutan dari bagian pengendalian pembangunan (dalbang)," kata Tri. (abdul malik mubarak)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Pengendalian Pembanguna	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Bangunan Gedung dan Aset			
3.			

Yogyakarta, 24 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005